

### BAB III.

## DINAMIKA PMA KOREA SELATAN DI INDONESIA TAHUN 1997-2006

### 3.1. Dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia

Perdagangan dan PMA merupakan modal yang diperlukan bagi pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Keduanya mempengaruhi pembangunan secara langsung ataupun tidak langsung. Modal, teknologi, keahlian manajemen, *training* bagi pekerja lokal, serta akses ke pasar yang lebih luas merupakan beberapa keuntungan dari PMA terhadap negara tujuan. PMA dapat meningkatkan kapabilitas negara melalui daya saing ekspor. Adapun daya saing ekspor merupakan elemen utama bagi pembangunan ekonomi yang akan menghasilkan: (1) peningkatan pendapatan devisa negara yang dapat digunakan untuk membiayai impor produk, jasa, serta teknologi yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas serta taraf hidup; (2) diversifikasi produk ekspor mulai dari komoditas primer hingga komoditas berteknologi tinggi; (3) pencapaian skala ekonomi yang lebih baik melalui pasar yang lebih luas dan heterogen; (4) peningkatan standar mutu; serta (5) akses informasi yang lebih mudah.<sup>61</sup>

Hubungan antara aliran PMA dengan pertumbuhan GDP suatu negara dinyatakan sebagai "hubungan yang stabil dan positif". PMA dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan dan tingkat produktivitas walaupun seberapa besar pengaruhnya masih sulit ditentukan. Pertumbuhan dipengaruhi oleh peningkatan total faktor produksi serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dapat terjadi dengan adanya jalinan antara PMA dan arus perdagangan luar negeri.

Keunggulan komparatif yang diunggulkan oleh Indonesia dalam menarik minat penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia tidak akan berarti tanpa adanya dukungan peraturan di bidang perizinan penanaman modal. Izin penanaman modal asing pertama kali dilakukan Indonesia dengan mengeluarkan

<sup>61</sup> Eisuke Sakakibara dan Sharon Yamakawa. "Regional Integration in East Asia: Challenges and Opportunities". dalam *Policy Research Working Paper 3079*, The World Bank East Asia, 2003, hal 2.

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penerapan peraturan, kebijaksanaan serta prosedur dalam pelaksanaannya kalau tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, seringkali menimbulkan hambatan yang menyebabkan lambannya penanganan proses aplikasi penanaman modal. Hal ini dapat memengaruhi minat penanaman modal khususnya penanaman modal asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

Perbaikan iklim investasi Indonesia diupayakan sejalan dengan kebijakan untuk mengembangkan industri berorientasi ekspor. Dengan kata lain, pemerintah berupaya untuk mengarahkan arus investasi tersebut pada pengembangan sektor industri yang berorientasi ekspor. Hal ini terlihat dari ciri-ciri kebijakan perdagangan dan industri Indonesia yang dihasilkan, seperti diberikannya izin bagi pihak asing untuk menguasai kepemilikan hingga 95% dan terdapatnya kredit ekspor dengan bunga rendah.

Perbaikan iklim investasi Indonesia antara lain ditempuh dengan mengeluarkan berbagai kebijakan deregulasi di bidang investasi yang diantaranya mencakup masalah perizinan, Hak Guna Usaha (HGU), kepemilikan dan masalah investasi. Hal-hal di atas merupakan fokus utama dalam perbaikan iklim investasi Indonesia terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan.

Tinjauan deregulasi investasi di Indonesia pada dasawarsa 1980 dapat diawali dari Paket Kebijakan 6 Mei 1986. Kebijakan ini merupakan langkah serius pertama dalam pengembangan industri berorientasi ekspor. Inti dari kebijakan ini adalah pemberian kesempatan kepada para eksportir untuk memperoleh masukan (input) bahan produksi dengan harga internasional, baik yang sepenuhnya diimpor maupun yang dibuat secara lokal. Strategi ini (memungkinkan perolehan input dengan harga internasional) merupakan langkah yang pernah ditempuh pula oleh Negara Industri Baru, khususnya Korea Selatan dan Taiwan dalam upaya mengembangkan industri padat karya yang berorientasi ekspor.<sup>62</sup>

Deregulasi berikutnya yang menonjol adalah PP No. 17 tahun 1992 yang memungkinkan kepemilikan saham oleh pihak investor asing hingga 100%. Kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah untuk membuka pintu

<sup>62</sup> Thee Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian*, Jakarta, LP3ES, 1994. hal. 34.

investasi sebesar mungkin bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepemilikan 100% itu sendiri tidak terlepas dari berbagai syarat, seperti besarnya modal yang harus mencapai minimal US\$ 50 juta dan berlokasi di wilayah Indonesia Timur, Jambi atau Bengkulu. Hal ini memperlihatkan bahwa kepemilikan 100% merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik wilayah-wilayah yang secara relatif tertinggal dibanding dengan Jawa misalnya.

Paket kebijakan lain yang juga penting dihasilkan pada tahun 1994, yakni Paket Deregulasi 14 Mei 1994 (PP No. 20 tahun 1994). Melalui paket kebijakan ini, pemerintah memberikan kemungkinan bagi pihak investor asing untuk memasuki sektor-sektor baru dalam bentuk *joint venture*, seperti misalnya sektor telekomunikasi, pelayaran dan tenaga nuklir, dengan minimal saham 5% dimiliki oleh pihak Indonesia. Paket ini juga memberikan kebebasan bagi pihak investor asing untuk menentukan besar kecilnya saham yang diberikan kepada pihak Indonesia, setelah perusahaan tersebut beroperasi secara komersial selama 30 tahun.

Selama masa dua dekade yang lampau, banyak negara termasuk Indonesia secara aktif mempromosikan negaranya untuk dijadikan sebagai tempat investasi. Tujuannya adalah untuk menarik modal swasta yang langka dan meningkatkan teknologi dan keahlian manajerial dalam rangka mewujudkan pembangunan. Selain membuat peraturan-peraturan yang membuka masuknya investasi asing secara langsung, salah satu promosi yang dilakukan adalah dengan memberikan berbagai insentif pajak. Untuk Indonesia insentif pajak mulai dilakukan dengan melakukan reformasi pajak tahun 2000.

Pemberian insentif merupakan salah satu hal mendasar yang dilihat oleh investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Disamping itu, investor juga mempertimbangkan adanya pasar yang baru, akses memperoleh bahan baku dan tenaga kerja. Sebelum menanamkan modalnya ke suatu negara, biasanya investor, khususnya investor luar negeri, mempertimbangkan dua faktor utama untuk menilai suatu negara guna dijadikan lokasi penanaman modal. Faktor pertama merupakan elemen mendasar yaitu adanya kesempatan ekonomi, stabilitas

politik dan kepastian hukum. Kemudian investor juga melihat apakah penerima investasi menyediakan berbagai insentif seperti insentif dalam bidang perpajakan dan berbagai insentif lain yang dianggap penting dan menguntungkan untuk melakukan penanaman modal.<sup>63</sup>

Beberapa negara menawarkan berbagai insentif pajak dengan berbagai alasan. Bagi negara yang berada pada transisi, pemberian insentif pajak merupakan suatu keharusan, dan hal ini biasanya diatur oleh undang-undang pajaknya. Bagi negara lain, pemberian insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor karena banyaknya hambatan yang membuat investor tidak mau menanamkan modalnya. Hambatan tersebut antara lain stabilitas politik yang kacau, birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum dan administrasi perpajakan yang kurang baik. Alasan lain dari pemberian insentif pajak adalah untuk meningkatkan daya saing dengan negara lainnya.

Bagi beberapa negara berkembang dan dalam masa transisi, pemberian insentif pajak tidak terbukti dapat meningkatkan penanaman modal. Pemberian insentif pajak tidak dapat menanggulangi berbagai masalah mendasar yang menghambat investasi seperti stabilitas politik dan ketidakpastian hukum. Singapura, Taiwan dan Irlandia, pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Negara-negara ini juga memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi. Akan tetapi, insentif pajak tidak digunakan sebagai satu-satunya instrumen dasar untuk menjaring investor. Insentif pajak hanya menjadi salah satu fasilitas yang diberikan terhadap PMA dan PMDN. Negara-negara ini tetap memberikan insentif pajak walaupun secara ekonomi tidak terganggu pertumbuhan ekonomi dalam negerinya.

Pemberian insentif-insentif pajak bagi investor dapat diartikan sebagai pengurangan beban pajak yang tujuannya membantu investor melakukan investasi pada proyek-proyek atau sektor-sektor tertentu. Insentif pajak yang diberikan seperti pengurangan tarif pajak penghasilan, pembebasan pajak, ketentuan-ketentuan akuntansi yang memperbolehkan penyusutan yang

---

<sup>63</sup> Pancras J. Nagy, *Country Risk, How To Assess, Quantify and Monitor*. London. Euromony Publications. 1979, hal. 54. Lihat juga Anwar Shah (ed), *Fiscal Incentives For Investment and Innovation*. New York. Oxford University Press. 1995.

dipercepat, kompensasi kerugian sampai jangka waktu tertentu, keringanan pajak impor bahan baku dan bahan pembantu dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

Sebagai gambaran, meskipun Indonesia memiliki tingkat pajak progresif yang relatif sama dengan negara-negara lain, insenti perpajakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap investor masih kurang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan survey yang dilakukan World Economic Forum (WEF), salah satu faktor dominan yang menghambat investasi adalah pada sektor perpajakan. Pengusaha asal Korea Selatan pun berpendapat bahwa sistem perpajakan Indonesia sangat menghambat investasi. Pasalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak mengakomodir dunia usaha.<sup>65</sup>

Dengan adanya insentif pajak, maka diharapkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia meningkat. Dengan adanya insentif pajak ini secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat profitabilitas usaha dalam jangka panjang. Indonesia menerapkan tarif efektif pajak penghasilan perusahaan sekitar 30%. Ini dianggap masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Malaysia 28%, Korea Selatan 26%, Vietnam 25%, Taipe 25%, Singapura 22%, dan Hongkong 17%. Namun dibandingkan dengan Thailand, China, Filipina, India, dan Jepang yang menerapkan tarif pajak antara 30-45%, maka tarif pajak Indonesia masih jauh lebih murah.

Dari penjelasan diatas, Indonesia telah melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk menarik modal asing. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang perkembangan PMA di Indonesia dari tahun 1999-2006 sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> United Nation Conference On Trade and Development (UNCTAD), *Tax Incentives And Foreign Direct Investment, A Global Survey*. New York and Geneva, United Nation Publication, 2000, hal. 4.

<sup>65</sup> "Pengusaha Versus Pengusaha", *Business News* No 7329, 24 Februari 2006, hal. 3.

**Tabel 3.1.1.**  
**Perkembangan Persetujuan Rencana PMA di Indonesia**  
**(1997-2006)**

<b>Penanaman Modal Asing</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Proyek</b>	<b>Nilai (US\$ juta)</b>
1997	778	33.665,7
1998	958	13.635,0
1999	1.179	10.894,3
2000	1.599	16.014,9
2001	1.388	16.371,3
2002	1.252	10.017,0
2003	1.245	14.362,8
2004	1.244	10.437,2
2005	1.648	13.579,2
2006	1.718	15.659,1

*Sumber: BKPM, 2006.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rencana penanaman modal asing di Indonesia mengalami fluktuatif. Pada tahun 1998 penanaman modal asing mengalami penurunan sangat drastis dari 33.665,7 juta US\$ turun menjadi 13.635 juta US\$. Hal ini terjadi karena terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara Asia termasuk Indonesia. Pada tahun 2000-2001 penanaman modal asing sempat naik nilainya sebesar 16.371,3 juta US\$ dibandingkan dengan tahun 1999 sebesar 10.894,3 juta US\$. Tahun berikutnya mengalami penurunan, sampai pada tahun 2006 penanaman modal asing di Indonesia naik kembali sebesar 15.659,1 juta US\$. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2001, akan tetapi dari jumlah proyek mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006 penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia kurang padat modal tetapi lebih kepada padat karya.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk menarik modal asing dari Korea Selatan, Indonesia mengadakan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dengan

Pemerintah Korca Selatan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea Concerning the Promotion and Protection of Investment*) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1991 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1994.<sup>66</sup>

Maksud dari persetujuan itu adalah menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penanaman modal oleh para investor dari satu pihak ke wilayah pihak lainnya berdasarkan persamaan kedaulatan dan keuntungan bersama. Juga mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal akan menimbulkan dorongan bagi inisiatif usaha swasta dan meningkatkan kemakmuran di kedua negara.

Dalam pasal 2 mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal dinyatakan bahwa masing-masing pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para investor pihak lainnya untuk menanamkan modal diwilayahnya dan mengizinkan penanaman modal itu menurut peraturan perundang-undangannya. Selain itu penanaman modal oleh para investor dari masing-masing pihak harus setiap waktu diperlakukan secara adil dan layak serta mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di dalam pihak lainnya.

Penanaman modal para investor dari salah satu pihak tidak boleh dinasionalisasikan, diambil alih kecuali untuk tujuan kepentingan umum yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam negeri dari pihak yang mengambilalih dengan ganti rugi secara penuh, tepat waktu dan efektif. Dengan kata lain perusahaan yang didirikan oleh investor asing dapat diambil alih tapi demi kepentingan umum dan harus mendapatkan ganti rugi sepenuhnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut pada tanggal 27 Desember 2005 dilakukan Pembukaan Kantor Perwakilan Kadin Indonesia di Seoul Korea. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fasilitas/layanan kegiatan perdagangan

---

<sup>66</sup> *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea Concerning the Promotion and Protection of Investment*. Lihat dalam <http://www.kadin-indonesia.or.id>, Diakses tanggal 12 Maret 2008, pukul 19.05.

produk Indonesia ke pasar Korea dan produk Korea ke pasar Indonesia serta untuk meningkatkan investasi Korea di Indonesia. Hal-hal yang melatarbelakangi pembukaan kantor perwakilan Kadin Indonesia di Seoul adalah karena:

1. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja sehingga diperlukan peningkatan kegiatan investasi, bisnis dan perdagangan dalam jumlah besar.
2. Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam melimpah yang perlu dikelola secara ekonomi, adanya bahan baku industri, produk industri dan SME yang mempunyai nilai jual di pasar internasional.
3. Korea Selatan merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang cukup maju dalam bidang ekonomi, kemampuan teknologi dan permodalan, sehingga dipandang sebagai salah satu negara potensial yang layak untuk dijadikan mitra dalam rangka hubungan bisnis, investasi dan perdagangan bagi Indonesia.
4. Korea Selatan mempunyai kekurangan bidang sumber daya alam dan bahan baku untuk kegiatan pembangunan dan industri, sehingga sangat diperlukan adanya kerjasama ekonomi dengan negara yang mempunyai sumber daya alam dan bahan baku industri tersebut, seperti Indonesia.
5. Industri Korea membutuhkan tenaga kerja Indonesia yang cukup besar, sehingga hal ini bisa dijadikan peluang ekspor tenaga kerja Indonesia ke Korea.
6. Perlu lebih ditingkatkan lagi ekspor Indonesia ke Korea (tahun 2004 ekspor ke Korea sebesar 6.368 milyar US\$, sementara impor Korea sebesar 3.677 milyar US\$) maupun investasi Korea di Indonesia (investasi Korea di Indonesia tahun 2004 sebesar 4,0 milyar US\$).

Dalam persetujuan tersebut ada beberapa tugas pokok yang harus dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan yaitu:

1. Menyelenggarakan kegiatan promosi perdagangan dan investasi, serta layanan penyediaan informasi bisnis.
2. Melakukan fasilitasi misi dagang dan investasi serta seminar, lokakarya dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan transfer teknologi.
3. Melakukan studi banding mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia usaha di Korea dan Indonesia.



4. Melakukan fasilitasi bisnis matching yang dapat meningkatkan realisasi perdagangan dan investasi.
5. Melakukan pengembangan UKM, antara lain pengembangan produk dan pasar di Korea, Indonesia dan negara ketiga, pembinaan manajemen, akses pembiayaan/permodalan, informasi bisnis, transformasi teknologi dan lainnya.

Pada periode 1967-2006, Korea Selatan menduduki peringkat 8 dalam nilai investasi penanaman modal asing di Indonesia setelah Jepang, Inggris, Singapura, Hongkong, Taiwan, Amerika Serikat, dan Belanda. Total investasi US\$ 10. 493,8 juta untuk 786 proyek. Korea Selatan berdasarkan nilai investasinya lebih banyak di sektor sekunder utamanya di bidang industri kimia, industri barang logam, industri makanan, dan industri tekstil. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1.2.**

**Peringkat Nilai Investasi Menurut Negara (1967-2006)**

No.	Negara	Total investasi		
		Proyek/Project	Nilai/Value (US\$ Juta/Mill)	%
1.	Japan	1.132	41,251.0	18.03
2.	Inggris	352	38,165.1	16.68
3.	Singapura	972	20,986.7	9.17
4.	Hongkong	395	19,196.6	8.39
5.	Taiwan	771	16,889.0	7.38
6.	Amerika Serikat	372	15,731.0	6.88
7.	Belanda	248	11,833.7	5.17
8.	Korea Selatan	786	10,493.8	4.59
9.	Australia	401	10,079.4	4.41
10.	Jerman	179	9,817.5	4.29

*Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2006.*

Dalam perkembangan selanjutnya, sampai dengan tahun 2006 Indonesia merupakan negara tujuan utama ketiga di Asia sebagai tempat investasi bagi

Korea Selatan. Negara tujuan utama investasi Korea Selatan di Asia adalah China. Pembahasan berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1.3.**  
**Negara Tujuan Utama Investasi Korea Selatan di Asia**

No	Negara	Nilai (US. 000)	Proyek
1	China	16.980.814	15.909
2	Hongkong	2.997.721	831
3	Indonesia	2.392.445	858
4	Vietnam	2.176.337	1.023
5	Singapura	1.467.553	237
6	Jepang	1.437.438	1.097
7	India	1.010.566	245
8	Filipina	816.403	827
9	Thailand	815.184	422
10	Malaysia	578.564	360

Sumber: KOTRA, 2006.

Berikut ini adalah gambaran mengenai rencana investasi Korea Selatan yang masuk ke Indonesia dari tahun 1999-2006 yang diperbandingkan dengan masuknya investasi dari Jepang. Walaupun Korea Selatan tidak mau disamakan dengan Jepang, tetapi dalam kenyataannya dilapangan terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Korea Selatan selalu meniru pola Jepang. Begitu juga dalam melakukan investasi di Indonesia ada persaingan diantara kedua negara tersebut dalam melakukan investasinya. Ada perbedaan pola dari investasi Jepang dan Korea Selatan di Indonesia yaitu Jepang dalam melakukan investasi sangat padat akan modal dan tidak banyak proyek yang dilakukan. Dengan kata lain Jepang lebih memikirkan nilai investasi yang ditanamkan daripada memperbanyak jumlah proyeknya di Indonesia.

Sementara Korea Selatan lebih kepada padat karya dengan memperbanyak jumlah proyeknya di Indonesia. Dari segi jumlah nilai investasi yang dilakukan

oleh Korea Selatan tidak sebesar nilai investasi yang dilakukan oleh Jepang. Jepang tidak mau direpotkan apabila tidak lagi melakukan investasi di suatu negara tidak dibebankan dengan masalah perusahaan yang ditinggalkan atau direlokasi. Semakin sedikit perusahaan yang didirikan di negara tempat berinvestasi maka semakin mudah untuk melakukan relokasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara Korea Selatan lebih suka dengan mendirikan anak-anak perusahaan di Indonesia karena selain masalah ekonomi juga karena ada kedekatan sejarah antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan punya pengalaman historis yang sama yaitu negara masing-masing pernah mengalami penjajahan kolonialisme, pemerintahan yang otoriter, dan mengembangkan demokratisasi.

Tabel di bawah ini adalah menggambarkan bagaimana perbandingan investasi yang dilakukan antara Korea Selatan dan Jepang di Indonesia.

**Tabel 3.1.4.**  
**Perbandingan Perkembangan Persetujuan Rencana Investasi**  
**Korea Selatan dan Jepang (1997-2006)**

Tahun	Korea Selatan		Jepang	
	Proyek	Nilai (US\$ juta)	Proyek	Nilai (US\$ juta)
1997	66	1.409,4	94	5.417,8
1998	112	202,4	78	1.330,7
1999	204	239,0	71	639,9
2000	287	689,5	93	1.954,8
2001	285	369,3	98	772,0
2002	248	378,9	83	518,9
2003	201	166,3	75	1.253,5
2004	212	420,4	76	1.694,2
2005	309	417,3	76	1.174,3
2006	313	887,2	55	443,6

Sumber: BKPM, 2006.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi antara Jepang dan Korea Selatan sangat jauh perbedaannya. Di Indonesia, Jepang adalah negara investor terbesar yang ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2006 Jepang mengurangi nilai investasinya di Indonesia sementara Korea Selatan justru menaikkan jumlah investasinya di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Korea Selatan ternyata masih membutuhkan Indonesia untuk tempat penanaman modalnya disamping kepentingan politik dan keamanan.

Persoalan upah buruh masih menjadi pertimbangan beberapa negara yang akan melakukan investasi di negara tuan rumah. Berikutnya adalah bagaimana perbandingan upah buruh antara Indonesia, China, dan Vietnam yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.5.**

**Perbandingan upah buruh antara Indonesia, China, dan Vietnam.**

	<b>Indonesia</b>	<b>China</b>	<b>Vietnam</b>
Upah Minimum	105 US\$	72,5 US\$	50 US\$
Jam Kerja Maksimum (jam/minggu)	54	60	60

*Sumber: KOTRA, 2006.*

Dari tabel diatas menurut perusahaan-perusahaan Korea yang melakukan investasi di tiga negara ini, upah buruh di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan China dan Vietnam yaitu sebesar 105 US\$. Hal ini masih ditambah lagi dengan jumlah jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan China dan Vietnam yaitu 54 jam per minggu. Diantara ketiga negara tersebut, upah buruh di Vietnam yang paling murah yaitu sebesar 50 US\$ dengan jumlah jam kerja 60 jam per minggu. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Korea Selatan mulai mengalihkan investasinya ke Vietnam, disamping alasan-alasan yang lainnya.

**Tabel 3.1.6.**  
**Perbandingan Investasi Korea ke Indonesia, China dan Vietnam**  
**(US\$ juta)**

Tahun	Indonesia	China	Vietnam	Total Investasi
1999	239,0	493,8	63,8	4.626,8
2000	689,5	1.004,9	98,2	6.122,6
2001	369,3	1.019,5	98,6	6.413,6
2002	378,9	2.111,4	388,2	6.454,8
2003	166,3	2.864,8	723,3	5.864,6
2004	420,4	3.717,2	356,8	8.194,7
2005	417,3	3.640,7	384,1	9.315,6
2006	887,2	4.535,3	1.774,8	18.712,2

*Sumber: Diolah dari KOTRA dan BKPM, 2006.*

Walaupun di dalam perkembangannya investasi dari Korea Selatan yang masuk ke Indonesia mengalami pasang surut, akan tetapi Korea Selatan masih setia melakukan investasinya di Indonesia. Walaupun pada antara tahun 2003 sampai 2005 Indonesia mendapat pesaing baru yaitu China dan Vietnam, namun pada tahun 2006, nilai investasi dari Korea Selatan meningkat jauh hampir dua kali lipat dari tahun 2005.

Diera dimana batas-batas wilayah menjadi kurang bermakna bagi pergerakan manusia, barang, dan modal, maka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat berpindah-pindah ke tempat yang memiliki keunggulan lokasional (L-advantage), terutama murah nya faktor produksi dan adanya berbagai insentif fiskal. Perusahaan asing akan datang kesuatu negara bila keunggulan-keunggulannya tadi bersinergi dengan L-advantage negara berkembang. Maka akan terjadi simbiosis mutualisme dimana perusahaan-perusahaan asing mendapat manfaat dari eksploitasi L-advantage dan negara berkembang dari tumpahan (spillover) dari hasil perkembangan tersebut.

Di Indonesia beberapa perusahaan-perusahaan besar dari Korea Selatan yang ikut menanamkan modalnya di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.7.**  
**Lima Perusahaan Besar Korea yang Menanamkan**  
**Modalnya ke Indonesia**

No	Nama Perusahaan	Nilai Investasi (US\$ juta)
1	LG Electric Indonesia	191,7
2	Samsung Electric Indonesia	103,29
3	Samsung Electric Indonesia untuk produk berbeda	67,89
4	Kolong Ina	30,0
5	Miwon Indonesia	25,8

*Sumber: KOTRA, 2006.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perusahaan besar Korea Selatan yang banyak menanamkan modalnya di Indonesia adalah perusahaan Samsung dengan nilai investasi sebesar 103, 29 juta US\$. Produk-produk elektronika dari Samsung banyak mengauasai pasar elektronika di Indonesia. Belum lagi dengan produk dari Samsung di bidang yang berbeda selain dari elektronika. Perusahaan lain yang juga banyak menanamkan modalnya di Indonesia adalah LG electric Indonesia sebesar 191,7 juta US\$. Dari keseluruhan perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia dapat menyerap tenaga kerja sebesar 600 ribu orang pekerja dari Indonesia.

Selanjutnya adalah sektor-sektor industri yang diminati oleh investor dari Korea Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.8.**  
**Persetujuan Investasi Korea Selatan di Indonesia Menurut Sektor Usaha**  
**(Periode 1997-2006)**

No.	Sektor	Proyek	Investasi (US\$.000)	%
1.	Industri Logam dasar dan Elektronika	276	1.194.488	35
2.	Industri Tekstil	397	459.458	13
3.	Kimia dasar dan Farmasi	85	434.805	13
4.	Perdagangan dan Reparasi	795	312.367	9
5.	Industri Barang Karet dan Barang Plastik	130	288.680	8
6.	Industri Makanan	44	220.815	6
7.	Kulit dan Sepatu	105	200.387	6
8.	Hotel dan Restoran	46	158.273	5
9.	Konstruksi	46	103.222	3
10.	Pertambangan	23	45.578	1
<b>Total</b>		<b>1.947</b>	<b>3.418.073</b>	<b>100</b>

*Sumber: BKPM, 2006.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fokus investasi yang diminati Korea Selatan hingga saat ini hampir disemua sektor industri. Industri logam dasar dan elektronika memiliki nilai investasi yang tinggi yaitu sebesar 1.194,4 juta US\$ atau sebesar 35 persen dari total seluruh sektor yang diminati. Selanjutnya yang kedua adalah industri tekstil dengan nilai investasi sebesar 459,4 juta US\$.

### **3.1.1. Perkembangan Ekspor Indonesia - Korea Selatan**

Dalam bidang perdagangan luar negeri, kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia selain ditujukan untuk meningkatkan daya saing juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menambah cadangan devisa. Kebijakan yang diambil pemerintah selain melalui peraturan yang mempermudah para eksportir

dalam kepabeanaan, juga menjadi fasilitator dalam mencari pasar internasional bagi produk dalam negeri.

Perkembangan nilai ekspor Indonesia sampai dengan tahun 1996 masih didominasi oleh ekspor migas. Tetapi sejak tahun 1997 dominasi ekspor tersebut beralih ke komoditi non migas. Pergeseran ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan deregulasi di bidang ekspor sehingga memungkinkan produsen dan eksportir untuk meningkatkan ekspor non migas.

Pada tahun 1998 nilai ekspor non migas telah mencapai 83,88 persen dari total nilai ekspor Indonesia, sementara itu pada tahun 1999 peran nilai ekspor non migas tersebut sedikit menurun, menjadi 79,88 persen atau nilainya 38.873,2 juta US\$ (turun 5,13 persen). Hal ini berkaitan erat dengan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Tahun 2000 terjadi peningkatan ekspor yang pesat, baik untuk total maupun tanpa migas yaitu menjadi 62.124,0 juta US\$ (27,66 persen) untuk total ekspor dan 47.757 juta US\$ (22,85 persen) untuk non migas. Namun peningkatan tersebut tidak berlanjut di tahun berikutnya.

Pada tahun 2001 total ekspor hanya sebesar 56.320,9 juta US\$ atau turun 9,34 persen. Demikian juga untuk ekspor non migas yang menurun 8,53 persen. Hal ini disebabkan karena melemahnya perekonomian dunia yang tumbuh lamban, khususnya perekonomian Amerika Serikat pasca pemboman Pentagon dan runtuhnya gedung WTC pada 11 September 2001. Tahun 2002 ekspor mengalami sedikit peningkatan menjadi 57.158,8 juta US\$ atau naik 1,49 persen, hal yang sama terjadi pada non migas yang naik 3,12 persen menjadi 45.046,1 juta US\$, walaupun kondisi keamanan di dalam negeri belum kondusif akibat tragedi pemboman di Legian Bali pada 12 Oktober 2002.

Ditengah-tengah maraknya perdagangan bebas ASEAN atau AFTA dan grup perdagangan bebas dunia atau WTO ternyata Indonesia mampu meningkatkan ekspor kembali. Di tahun 2003 ekspor mengalami peningkatan menjadi 61.058,2 juta US\$ atau naik 6,82 persen. Hal yang sama terjadi pada ekspor non migas, yang naik 5,24 persen menjadi 47.406,8 juta US\$. Nilai ekspor pada tahun 2004 mencapai US\$71.584,6 juta tau naik 17,24 persen. Pada tahun 2005 total ekspor naik cukup pesat mencapai US\$ 85.660,0 juta. Tahun 2006



menjadi rekor tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu mencapai US\$ 100.798,5 juta atau naik 17,67 persen dibanding nilai ekspor tahun sebelumnya.

Perkembangan ekspor dan impor tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1.9.**  
**Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor 1999-2006**  
(juta US\$)

Tahun	Migas		Non Migas	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1999	9.792,2	3.681,1	38.873,2	20.322,2
2000	14.366,6	6.019,5	47.757,4	27.495,3
2001	12.636,3	5.471,8	43.684,6	25.490,3
2002	12.112,7	6.525,8	45.046,1	24.763,1
2003	13.651,4	7.610,9	47.406,8	24.939,8
2004	15.645,3	11.732,0	55.939,3	34.792,5
2005	19.231,6	17.457,7	66.428,4	40.243,2
2006	21.209,5	18.962,9	79.589,1	42.102,6

Sumber: Statistik Indonesia, 2006.

Nilai ekspor Indonesia selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 61,1 miliar US\$. Kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi 71,6 miliar US\$, atau naik sebesar 17,2 persen dibandingkan tahun 2003. Kemudian pada tahun 2005 meningkat kembali sebesar 19,7 persen menjadi 85,7 miliar US\$ dan pada tahun 2006 mencapai 100,8 miliar US\$ atau naik sebesar 17,7 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor non migas sebesar 19,8 persen yaitu 66,4 miliar US\$ pada tahun 2005 menjadi 79,6 miliar US\$ pada tahun 2006. Sedangkan ekspor migas naik sebesar 10,3 persen yaitu 19,2 miliar US\$ menjadi 21,2 miliar US\$.

Surplus neraca perdagangan Indonesia ditunjukkan dengan naiknya ekspor dan berkurangnya impor. Persentase nilai impor selama empat tahun terakhir ini

selalu menunjukkan penurunan. Pada tahun 2003 nilai impor Indonesia mencapai 32,6 miliar US\$. Nilai tersebut kemudian menjadi sebesar 46,5 miliar US\$ pada tahun 2004 yang berarti meningkat 42,9 persen. Selanjutnya nilai impor Indonesia pada tahun 2005 sebesar 57,7 miliar US\$ namun angka ini secara persentase lebih rendah peningkatannya dibandingkan impor tahun sebelumnya yang naik sebesar 24,0 persen. Di tahun 2006 volume impor mencapai 61,1 miliar US\$ dengan persentase kenaikan hanya 5,8 persen.

Kinerja ekspor Indonesia sampai saat ini masih didukung oleh komoditi non migas yang menghasilkan devisa cukup tinggi. Sebagai penyumbang terbesar ekspor Indonesia, kontribusinya pada periode 2002-2006 berkisar antara 77 sampai 79 persen. Sementara itu jika dilihat perkembangan pertumbuhan nilai ekspor non migas selama lima tahun terakhir ini tidak jauh berbeda polanya dengan perkembangan total nilai ekspornya.

Agar ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional, Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas produknya supaya tidak kalah bersaing dan terus mengembangkan inovasi produknya agar dapat unggul dalam persaingan. Perkembangan ekspor hasil pertanian Indonesia selama periode 2002-2006 sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2003 dan 2004 nilai ekspor pertanian Indonesia mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,64 persen dan 1,19 persen. Keadaan tersebut terjadi karena produk pertanian Indonesia masih kalah bersaing di pasar ekspor dengan negara lain seperti China yang mulai aktif melakukan ekspansi di sektor pertanian tersebut khususnya hortikultura, disamping negara tetangga Malaysia dan Thailand.

**Tabel 3.1.10.****Urutan 10 Besar Negara Sasaran Ekspor Indonesia (US\$ miliar)**

No	Negara	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Jepang	10,3	14,4	13,0	12,0	13,6	15,9	18,0	21,7
2	USA	6,8	8,4	7,7	7,5	7,4	8,8	9,8	11,2
3	Singapura	4,9	6,5	5,3	5,3	5,4	6,0	7,8	8,9
4	Korea Selatan	3,3	1,5	4,1	4,1	4,3	4,8	7,1	7,7
5	China	2,1	1,4	3,1	2,9	3,8	4,6	6,6	8,3
6	Taiwan	1,7	4,3	2,0	2,0	2,2	2,8	2,5	2,7
7	Belanda	1,5	2,7	1,4	1,6	1,4	1,8	2,2	2,5
8	Australia	1,5	0,5	1,8	1,9	1,8	1,8	2,2	2,7
9	Hongkong	1,3	2,3	1,2	1,2	1,1	1,4	1,5	1,7
10	Malaysia	1,3	1,0	1,7	2,0	2,3	3,0	3,4	4,1

Sumber: BPS, 2006.

Berdasarkan tujuan ekspor, maka selama lima tahun terakhir sebaran ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor hanya mengalami sedikit perubahan. Artinya proporsi ekspor ke negara-negara tujuan ekspor utama relatif tetap. Negara Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan masih tetap menjadi gantungan utama ekspor Indonesia. Selain itu negara yang sangat potensial menjadi tujuan ekspor Indonesia diantaranya negara-negara ASEAN khususnya negara Singapura dan Malaysia. Ada fenomena yang cukup menarik terutama sejak tahun 2004 yaitu pesatnya ekspor ke kawasan Asia lainnya terutama China. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran tujuan ekspor menuju ke China.

Jepang sebagai negara yang banyak menyerap ekspor Indonesia selama kurun waktu 1999-2006 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada tahun 2006 dimana nilai ekspor Indonesia ke Jepang meningkat lebih tinggi sebesar 21,7 miliar US\$. Negara tujuan kedua adalah Amerika Serikat yang

sampai akhir tahun 2003 nilai ekspor Indonesia ke Amerika turun 2,45 persen atau hanya mampu menyerap ekspor Indonesia sebesar 7,3 miliar US\$. Memasuki tahun 2004-2006 mengalami peningkatan yang cukup berarti. Sampai akhir tahun 2006 nilai ekspor ke Amerika mencapai 11,2 miliar US\$ atau meningkat sebesar 13,82 persen dari tahun 2005.

Korea Selatan walaupun menempati urutan keempat sasaran ekspor Indonesia, mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2001-2006. Sampai akhir tahun 2006 ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar 7,6 miliar US\$.

Untuk komoditi ekspor Indonesia ke Korea Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.11.**  
**Komoditas Ekspor Indonesia ke Korea Selatan (1999-2006)**  
(juta US\$)

No	Komoditas *	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	<b>Migas</b>								
1	Minyak bumi mentah	746,2	1.033,8	1.193,1	1.026,2	1.131,1	1.183,7	2.015,9	1.319,2
2	Hasil-hasil minyak	30,4	56,2	28,1	295,6	218,4	222,6	128,9	234,3
3	Gas	1.077,6	1.350,5	752,5	1.010,8	1.207,5	1.577,8	2.345,4	2.725,5
	<b>Non Migas</b>								
4	Kayu gergajian	14,1	18,7	23,0	28,6	21,3	28,7	29,8	21,4
5	Timah putih	1,2	0,0	0,4	0,9	1,2	8,0	2,2	
6	Tembaga	166,4	233,8	314,6	287,7	266,1	220,5	511,2	712,6
7	Industri kayu lapis	117,5	102,4	114,9	124,2	137,4	96,4	84,6	68,0
8	Kepiting, erang-kerangan	-	-	-	1,1	0,9	1,4	2,3	3,2
9	Karet Olahan	-	-	-	44,9	63,4	74,9	76,1	154,8
10	Alat listrik	-	-	-	71,0	64,1	67,2	83,6	88,3
11	Audio Visual	-	-	-	41,5	59,8	57,7	91,3	81,3

Sumber: BPS

\* data berdasarkan ekspor terhadap negara menurut tujuan utama

Volume ekspor minyak bumi mentah pada tahun 2002 mengalami penurunan dari 32.857,0 ribu m. ton menjadi 29.054,4 ribu m. ton. Kemudian pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 26.517,5 ribu m. ton. Sementara nilai ekspor minyak bumi mentah pada tahun 2002 mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor minyak mentah ini lebih dipengaruhi oleh gejolak naik turunnya harga minyak mentah di pasaran internasional yang berkisar antara 19-22 US\$ per barel dan juga karena terbatasnya produksi dalam negeri. Pada tahun 2003 mengalami peningkatan lagi dari 5.227,6 juta US\$ menjadi 5.621,0 juta US\$.

Negara tujuan utama ekspor minyak bumi mentah adalah Jepang. Pada tahun 2003 pangsa nilai ekspor minyak bumi mentah ke negara tersebut sebesar 1.877,6 juta US\$. Posisi terbesar kedua adalah Korea Selatan senilai 1.311,1 juta US\$ dari total ekspor minyak bumi mentah.

Nilai ekspor hasil-hasil minyak pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 18,83 persen menjadi 1.553,7 juta US\$. Sebagian besar komoditi ini diekspor ke Jepang yang mencapai nilai 487,8 juta US\$ atau 31,40 persen dari total ekspor hasil minyak tahun 2003. Kemudian pangsa pasar utama lainnya adalah Singapura dan Korea Selatan dengan masing-masing nilai 295,4 juta US\$ dan 218,4 juta US\$.

Total nilai ekspor gas Indonesia pada tahun 2003 telah mencapai 6.476,7 juta US dollar. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2002, total nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 16,12 persen. Seperti halnya minyak bumi mentah, untuk komoditi gas, Jepang tetap merupakan negara konsumen terbesar ekspor gas Indonesia dengan nilai 4.407,7 juta US dollar kemudian Korea Selatan peringkat kedua dengan nilai 1.207,5 juta US dollar.

Selanjutnya komoditi-komoditi non migas untuk diekspor dapat dikelompokkan menjadi komoditi primer dan komoditi bukan primer. Komoditi primer merupakan hasil dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sedangkan komoditi bukan primer berasal dari sektor industri. Untuk sektor pertanian ekspor Indonesia ke Korea Selatan ada bidang kayu gergajian. Untuk

sektor pertambangan adalah ekspor timah putih dan tembaga, di bidang industri adalah industri kayu lapis.

Jika dilihat dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 volume dan nilai ekspor kayu gergajian terjadi peningkatan. Pada tahun 2002 nilai ekspor kayu gergajian sebesar 371,3 juta US\$. Akan tetapi pada tahun 2003 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 302,5 juta US\$. Begitu juga dengan ekspor kayu gergajian ke Korea Selatan dari tahun 1999-2002 mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 nilai ekspor kayu gergajian sebesar 28,6 juta US\$, dan tahun 2003 mengalami penurunan dengan nilainya sebesar 21,3 jutaUS\$.

Jumlah nilai ekspor timah putih dari tahun 1999-2002 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2003 mulai meningkat dengan nilai sebesar 295,7 juta US\$. Untuk Korea Selatan begitu juga, dari tahun 1999-2002 mengalami penurunan dan tahun 2003 nilai ekspor timah putih naik yang jumlahnya sama dengan tahun 1999 yaitu 1,2 juta US\$. Ekspor timah putih Indonesia didominasi oleh Singapura yang pada tahun 2003 nilai ekspornya sebesar 200,4 juta US\$.

Tembaga masih tetap merupakan komoditi ekspor utama sektor pertambangan di luar migas. Nilai ekspor tembaga dari tahun1999-2003 mengalami peningkatan yang pada tahun 2003 sebesar 2.485.490,3 juta US\$. Untuk ekspor tembaga, Jepang menempati posisi pertama dengan total nilai ekspor pada tahun 2003 sebesar 650.602,5 juta US\$. Posisi kedua adalah Korea Selatan yang mengalami peningkatan dari tahun 1999-2003 dengan nilai ekspor pada tahun 2003 sebesar 266.124,9 juta US\$.

### **3.1.2. Perkembangan Impor Indonesia - Korea Selatan**

Selain kebijakan ekspor pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang impor yang ditujukan untuk menunjang serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri khususnya yang berorientasi ekspor. Selain itu kebijakan impor juga ditujukan untuk tetap menjaga tersedianya kebutuhan barang dan jasa, dan meningkatkan pendayagunaan devisa dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan kegiatan impor merupakan dampak dari globalisasi yang menuntut adanya keterbukaan ekonomi suatu negara terhadap kegiatan perdagangan antar negara. Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul tersebut pemerintah memberlakukan kebijakan deregulasi baru guna menyelaraskan kebijakan yang saling terkait satu sama lain.

Salah satu masalah yang akan dibenahi oleh pemerintah adalah keterlambatan proses impor barang dari sejak kapal tiba sampai barang keluar dari kawasan pelabuhan (*impor clearance*). Untuk mempercepat proses kegiatan impor tersebut langkah yang diambil pemerintah adalah mengadakan kerjasama dengan ASEAN menerapkan sistem perdagangan dan kegiatan ekspor dan impor secara terpadu yang disebut ASEAN Single Window (ASW). Jika ASW ini diterapkan, dapat menjadi terobosan memperbaiki kinerja pelabuhan dan kegiatan ekspor impor sehingga seluruh kegiatan pengeluaran barang dan pengurusan dokumen dilakukan dengan sistem on line sehingga importir cukup mengurus proses pengeluaran barang dan dokumen hanya lewat komputer. Untuk mengimplementasikan ASW masing-masing negara ASEAN harus membuat Tim Koordinasi Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.

Nilai impor Indonesia selama tahun 1999-2006 menunjukkan peningkatan Setiap tahunnya. Kenaikan nilai impor yang cukup mengejutkan terjadi pada tahun 2004 dengan kenaikan mencapai 42,93 persen dari 32.550,7 juta US\$ pada tahun 2003 menjadi 46.524,5 juta US\$ pada tahun 2004. Namun dalam tahun 2005 nilai impor dapat dikendalikan hingga mencapai 57.700,9 juta US\$ atau mengalami kenaikan 24,02 persen meskipun masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.12.**  
**Nilai Impor Indonesia menurut Migas dan Non Migas**  
**(US\$ juta)**

Impor	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Migas	3.681,1	6.019,5	5.471,8	6.528,8	7.610,9	11.732,0	17.457,7	18.962,9
Non Migas	20.322,2	27.495,3	25.490,3	24.763,1	24.939,8	34.792,5	40.243,2	42.102,6
Jumlah	24.003,3	33.514,9	30.962,1	31.288,9	32.550,7	46.524,5	57.700,9	61.065,5

Sumber: BPS, 2006.

Nilai impor Indonesia di dominasi oleh impor non migas, karena impor non migas sangat berkaitan dengan pertumbuhan investasi dan kegiatan industri di dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku industri yang belum dapat di produksi di dalam negeri. Sampai akhir tahun 2003 nilai impor non migas masih dapat dikendalikan, terlihat dari nilainya yang mengalami sedikit peningkatan dari 24.763,1 juta US\$ pada tahun 2002 menjadi 24.939,8 juta US\$ pada tahun 2003 atau naik 0,71 persen. Usaha pemerintah untuk mempertahankan impor non migas supaya pertumbuhannya relative kecil kandas pada tahun 2004 karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar 39,50 persen atau mencapai 34.792,5 juta US\$.

Untuk memenuhi kebutuhan migas di dalam negeri yang masih kurang jika hanya mengandalkan produksi di dalam negeri, maka Indonesia perlu mengimport migas. Kontribusi nilai impor migas terhadap total nilai impor Indonesia meningkat setiap tahunnya. Tingginyakenaikan nilai impor migas karena pengaruh kenaikan harga minyak dunia yang mencapai US\$ 50 per barelnya.

Dalam pembahasan selanjutnya adalah komoditas impor Indonesia dari Korea Selatan dari tahun 1999-2006. Komoditas yang dibahas pada tabel dibawah



ini adalah komoditas impor dari Korea Selatan ke Indonesia yang masuk dalam kategori negara tujuan utama impor Indonesia. Dengan kata lain, komoditas impor dari Korea Selatan yang tidak termasuk kategori negara tujuan utama tidak dibahas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3.1.13.**  
**Komoditas Impor Indonesia dari Korea Selatan, 1999-2006**  
**(US\$ juta)**

No	Komoditas	Tahun							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pupuk	14,3	9,4	9,8	19,4	16,7	20,2	21,2	13,2
2.	Semen	208,1	175,7	148,3	74,7	73,7	294,4	97,6	42,0
3.	Pipa besi dan baja	12,2	21,7	19,6	14,5	24,8	20,5	43,0	33,9
4.	Kendaraan bermotor	78,9	57,0	40,4	23,5	23,6	25,4	19,4	8,2
5.	Mesin keperluan industri	35,0	67,3	63,6	73,1	56,7	84,9	68,3	70,2
6.	Perlengkapan telco-komunikasi	-	-	-	27,2	116,1	134,0	79,2	50,6

Sumber: BPS, 2006.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komoditas impor dari Korea Selatan lebih banyak di sektor non migas. Setiap tahunnya impor dari Korea Selatan di berbagai bidang mengalami penurunan. Impor yang paling besar mengalami

penurunan adalah impor kendaraan bermotor. Penurunan ini terjadi karena mulai masuknya produk kendaraan bermotor dari China yang memiliki nilai jual lebih murah dan dapat bersaing dipasar dunia dan Indonesia. Penurunan impor dari Korea Selatan yang lain adalah impor semen pada tahun 1999-2001. Memang semen sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan pembangunan. Impor semen dilakukan oleh Indonesia karena hasil produksi semen yang ada di Indonesia tidak mencukupi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. Akan tetapi dalam tahun 2004 naik kembali seiring semakin meningkatkan pembangunan perumahan-perumahan, apartemen, hotel dan sebagainya.

### **3.2. Faktor China dan Vietnam Sebagai Tempat Investasi Yang Menarik Bagi Korea Selatan**

China dan Vietnam merupakan pesaing yang kuat bagi Indonesia karena banyak bersaing dalam ekspor hasil-hasil industri padat karya yang sama dengan Indonesia seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Pertumbuhan ekspor hasil-hasil industri kedua negara ini justru bertambah pesat ketimbang ekspor Indonesia. Demikian juga halnya dalam bidang investasi, China dan Vietnam menjadi tempat yang menarik bagi banyak negara didunia untuk melakukan investasi.

Secara umum ada dua hal yang membuat China dan Vietnam sangat menarik bagi Korea Selatan untuk menanamkan modalnya, yaitu:

- a. Upah buruh kini tidak hanya murah tetapi mereka juga harus terampil dalam soal kemampuan berbahasa dan keahlian secara teknik..
- b. Transportation cost, para investor akan lebih memilih negara yang jaraknya dekat dari negaranya.

Ada beberapa faktor lain yang menjadikan China sebagai tempat investasi yang menarik selain yang dikemukakan diatas yaitu:

- a. Pasar lokal yang sangat besar
- b. Keunggulan geografi, sebagai pusat utama dari ekonomi Asia Timur, NIEs, dan Jepang.
- c. Mempunyai hubungan kebudayaan dengan China perantauan dan perkembangan ekonomi negara tetangga.

- d. Melakukan reformasi dengan kebijakan pintu terbuka pada tahun 1979, dan pertengahan tahun 1980an melakukan integrasi ekonomi Asia.
- e. Strategi baru setelah tahun 1993 yaitu ekonomi pasar.
- f. Mempunyai akses ke WTO.
- g. Melakukan liberalisasi di segala sektor.
- h. Menjadi tempat yang menguntungkan bagi investasi.

Sementara bagi Vietnam ada beberapa faktor yang mendorong masuknya investasi ke Vietnam terutama dari Korea Selatan yaitu:

- a. Perkembangan pasar dengan ekonomi yang stabil dan lingkungan politik yang stabil.
- b. Pemerintahan yang kuat dan kebijakan yang konsisten untuk menarik investasi.
- c. Muncul sebagai tujuan alternatif dari China.
- d. Faktor lainnya adalah tenaga kerja murah, pasar domestik yang potensial, kualitas tenaga kerja tinggi, dan keunggulan geologi.

### **3.2.1. Perkembangan Investasi Korea Selatan di China**

China menempuh integrasi perekonomiannya melalui jalur perdagangan dan investasi sebagaimana yang dilakukan oleh Jepang dan Korea. Berbagai struktur ekonomi yang diciptakan dalam proses reformasi ekonomi China sebenarnya dapat juga ditemukan di beberapa negara lainnya, akan tetapi dalam kenyataannya apa yang terjadi di China cukup unik. Reformasi ekonomi pada awalnya lebih dikedepankan untuk memacu nilai keuntungan guna membiayai modernisasi masyarakat di China. Tantangan terberat terjadi manakala pemerintah harus mencari solusi guna memotivasi para pekerja dan petani agar menghasilkan keuntungan yang lebih besar guna menghilangkan ketidakseimbangan ekonomi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam lawatan kenegaraan pada November 1978, Deng Xiaoping mengunjungi Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Deng memperoleh sumber inspirasi untuk memulai pembangunan di China setelah berdiskusi dengan Lee

Kuan Yew.<sup>67</sup> Hal inilah yang menjadi titik tolak dimulainya reformasi pembangunan ekonomi China. Deng mencoba membangun China dengan cara modern, bertahap dan tidak revolusioner. Pada dasarnya Deng tetap berpedoman pada teknik perencanaan yang dibuat oleh Mao Tse-Tung, namun memodifikasinya dengan pendekatan pembangunan Singapura yaitu mulai membuat blok-blok bangunan sebagai infrastruktur dasar.

Pemerintah China menyadari bahwa untuk membuka lapangan pekerjaan, negara membutuhkan berbagai bangunan modern seperti jalan tol, pelabuhan, jalur kereta api dan bandar udara. Setelah melewati masa-masa pembangunan infrastruktur dan dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung usaha bisnis serta dikombinasikan dengan upah pekerja yang murah, akhirnya reformasi dan pembangunan ekonomi di China memberikan hasil.<sup>68</sup>

Meskipun strategi reformasi ekonomi China lebih dikarakteristikan oleh banyak kalangan sebagai model kapitalisme namun China lebih senang memandangnya sebagai sebuah bentuk pendekatan "sosialisme dengan karakter China".<sup>69</sup> Menurut kebanyakan petinggi China, ideologi pemerintah tidaklah lebih penting daripada kebutuhan dasar dari rakyatnya. Ucapan Deng Xiaoping sebagai pencetus reformasi ekonomi yang masih bergema sampai sekarang adalah "*It doesn't matter if the cat is black or white, as long as it catches mice*" (tidak masalah kucing itu hitam atau putih selama ia masih menangkap tikus). Dalam kurun waktu seperempat abad, jumlah rakyat miskin yang tinggal dipedesaan China menurun dari 250 juta menjadi hanya 26 juta.<sup>70</sup>

Kegiatan manufaktur telah menjadi kendaraan utama bagi pertumbuhan ekonomi China dengan kontribusi sebesar 49 persen dari total GDP. Sebuah laporan dari A CII-McKinsey di tahun 2002 menggarisbawahi lima kunci

---

<sup>67</sup> Lihat Lee Kuan Yew, *From Third World to First: The Singapore Story, 1965-2000*, New York, Harper Collins, 2000.

<sup>68</sup> Feng Zhenghui, ed. *Stories of China's Reform and Opening-Up*, Shenzhen, Story of China Publishing, Agustus, 2004.

<sup>69</sup> Banyak pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi China bukanlah sistem komunis secara penuh, namun bukan juga kapitalis secara sungguh-sungguh.

<sup>70</sup> Lihat Paul Wolfitz, *Statement Issued on Visit to China*, Washington, World Bank, Oktober 2005.

reformasi yang ditempuh oleh pemerintah China dalam menciptakan booming pada sektor manufaktur. Kelima kebijakan tersebut, yaitu:<sup>71</sup>

1. Pengurangan dan penyederhanaan pajak langsung dari 30 persen di tahun 1994 menjadi 17 persen di tahun 2002.
2. Pengurangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam hal impor yang nilainya setengah dari kewajiban impor.
3. Implementasi dari peraturan hukum buruh yang lebih longgar dan menerapkannya sebagai praktik terbaik bagi *Foreign Invested Enterprises* (FIEs).
4. Menciptakan *Special Economic Zones* (SEZs) yang saling berintegrasi satu sama lain.
5. Menjaga suku bunga yang rendah untuk menstimulasi masuknya investasi.

Dalam perkembangan selanjutnya China yang biasanya sangat tertutup terhadap apapun yang bersifat asing akibat dari warisan ideologi politik masa lalu, kini mulai membuka diri. Setelah krisis yang pernah dialami tiga negara utama di ASEAN yaitu Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan pada tahun 1997-1999, China adalah salah satu negara di Asia yang tidak terkena imbasnya secara langsung dari krisis tersebut. Perkembangan perekonomian mereka mulai mengalami perkembangan yang dinamik dan ekspansif serta mendapat perhatian yang besar dari negara-negara maju.

Ada lima kebijakan penting bagi pemerintah China dan mempunyai arti yang maksimal bagi pengembangan pasar China baik domestik maupun yang bersifat eksternal.<sup>72</sup> *Pertama*, kebijakan yang mendorong pembangunan sektor swasta yang benar-benar menguntungkan kehidupan ekonomi rakyat secara nasional. Semua aturan yang bertentangan dengan pembangunan perusahaan swasta harus dihapus, untuk menjamin tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan swasta tersebut. *Kedua*, perusahaan milik negara harus mengadopsi aturan dan regulasi khusus dari pemerintah. Dengan kata lain perusahaan negara

<sup>71</sup> A CH-McKinsey Report. *Learning From China to Unlock India's Manufacturing Potential*. Oktober 2002, hal. 19-23.

<sup>72</sup> Zainuddin Djafar. *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*. Jakarta. Pustaka Jaya, 2008, hal. 68-69.

tidak mempunyai hak-hak istimewa, dan mereka juga harus melakukan kompetisi yang fair dengan perusahaan swasta lainnya dalam tatanan hukum yang sama. *Ketiga*, pemerintah harus melakukan pengumuman resmi bahwa berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku, keuntungan dan pemilikan kekayaan perusahaan harus dilindungi dan semua kegiatan ekonomi menerima perlakuan nasional tanpa diskriminasi. *Keempat*, China secara resmi masuk sebagai anggota WTO dan harus menyesuaikan dirinya pada situasi dunia yang baru dan menghapus tatanan hukum dan aturan yang tidak sesuai dengan aturan WTO. *Kelima*, prinsip kehidupan ekonomi politik yang bersifat sosialis dan menyangkut keadilan sosial serta kesejahteraan umum harus menjadi perhatian penting.

Pada periode 1990-2000, China menggalakkan peningkatan investasi nasional, baik oleh pebisnis dalam negeri maupun oleh investasi asing. Perusahaan dunia yang mempunyai merek terkenal mulai membangun sarana produksi dan pemasaran di China. Masuknya berbagai modal, teknologi dan manajemen canggih telah meningkatkan profesionalisme pengusaha China, kualitas produksi dan keterampilan tenaga kerja China secara luas. Konsumen China dapat membeli produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, pendapatan buruh China dan kekayaan pebisnis China juga meningkat pesat. Investasi asing di China telah menghasilkan "win-win solution" bagi semua pihak.

Pada periode 2001-2006, pemerintah China mulai memotivasi perusahaan China berinvestasi ke luar negeri, menargetkan pasar dunia yang begitu menjanjikan, sekalipun potensi pasar China sangat besar dari penduduk yang berjumlah lebih dari 1 milyar orang. Investasi asing dapat terjadi dua arah, namun dimulai satu arah dulu yaitu investasi kedalam seperti yang terjadi di China untuk memperoleh pengalaman bagaimana bermain di pasar dunia.

Sementara itu China mempunyai karakteristik ekspor ke pasar global yaitu: mengintensifkan tenaga kerja dan biaya produksi rendah dan harga produk murah, mempunyai kekuatan perdagangan yang sejajar dengan Jepang maupun Korea Selatan, melakukan pendekatan regional dengan ASEAN melalui CAFTA

dan multilateral melalui WTO.<sup>73</sup> Dengan perkembangan ekspor yang tinggi maka total GDP China pada tahun 2005 mencapai 2.3 triliun US\$.

China juga memberikan berbagai paket insentif pajak untuk menjaring investor. Undang-Undang Pajak Penghasilan Cina memberikan berbagai jenis insentif pajak. Pada sektor regional, insentif pajak yang diberikan adalah tarif pajak penghasilan yang rendah yaitu 15% untuk hasil-hasil produksi untuk menarik investasi langsung dari kawasan yang disebut kawasan ekonomi yang khusus (*special economic zones*) untuk investasi.

Insentif yang diberikan secara sektoral, yaitu pembebasan pajak pada tahun pertama sampai tahun kedua masa investasi, sementara tahun ketiga sampai kelima diberikan pengurangan pajak penghasilan sebesar 50%. Cina mempunyai tingkat tarif pajak 30% + 3% lokal.

Bangkitnya China sebagai kekuatan perekonomian baru menjadi fenomena dan perhatian seluruh dunia termasuk Korea Selatan. Hubungan ekonomi China dan Korea Selatan berkembang sangat pesat. Satu tahun setelah menormalisasikan hubungannya dengan Korea Selatan, China menjadi mitra dagang ketiga terbesar Korea setelah Amerika Serikat dan Jepang. China juga menjadi tujuan investasi yang paling diminati oleh perusahaan-perusahaan Korea.

Berikut ini dapat dilihat 10 besar negara tujuan utama investasi Korea dari tahun 1999-2006 dalam tabel berikut ini.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 71-72.

<sup>74</sup> Eun Mee Kim and Jai S. Mah, "Patterns of South Korea's Foreign Direct Investment Flows Into China", *Asian Survey*, Vol XLVI, No. 6, November/Desember 2006, hal. 891

**Tabel 3.2.1.**  
**Sepuluh Besar Negara Tujuan Investasi Korea Selatan**  
**(1999-2006, US\$. 000)**

No.	Negara	Proyek	Total
1	China	12.925	14.102.554
2	U S A	5.968	12.031.189
3	Jepang	847	1.075.163
4	Vietnam	810	1.580.070
5	Hong Kong	523	2.590.359
6	Indonesia	201	663.880
7	Singapura	122	1.231.855
8	Australia	111	283.965
9	Filipina	72	288.345
10	Inggris	37	1.278.754

*Sumber : Export-Import Bank of Korea, 2006.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa China menempati urutan pertama tujuan utama investasi Korea Selatan dengan nilai sebesar 14,10 miliar US\$ dengan jumlah proyek sebesar 12.925. Ditempat kedua adalah Amerika Serikat dengan nilai investasi sebesar 12,03 miliar US\$ dengan jumlah proyek sebesar 5.968. Ditempat ketiga adalah Jepang dengan nilai investasi sebesar 1,07 miliar US\$ dengan jumlah proyek sebesar 847. Sampai dengan tahun 2006, Indonesia ada di posisi keenam dari sepuluh negara tujuan investasi Korea Selatan di dunia yaitu sebesar 663,88 juta US\$ yang tersebar di berbagai bidang seperti industri, kehutanan dan lain sebagainya.

Tabel berikut adalah perkembangan investasi Korea Selatan ke China dari tahun 1999-2006 sebagai berikut:<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Deok Ryong Yoon. *loc.cit.*



**Tabel 3.2.2.**  
**Perkembangan Investasi Korea Selatan ke China**  
**(US\$ juta, %)**

	China		Total di Dunia	
	Proyek ( % )	Nilai ( % )	Proyek	Nilai
1999	460 (42.0)	353,3 (10.8)	1094	3.276.8
2000	773 (37.3)	682,2 (13.7)	2.070	4.995.9
2001	1.037 (48.5)	592,5 (11.7)	2.136	5.075.4
2002	1.365 (55.5)	985,4 (27.6)	2.459	3.565.6
2003	1.676 (60.1)	1.508,3 (39.7)	2.790	3.797.4
2004	2.149 (57.1)	2.157,4 (37.8)	3.762	5.715.0
2005	2.240 (51,0)	2.647,0 (40,4)	4.389	6.557,0
2006	2.300 (44,4)	3.310,0 (30,8)	5.185	10.731,0

*Sumber: The Export-Import Bank of Korea, 2006.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 1999-2006 terjadi peningkatan nilai investasi maupun jumlah proyek dari Korea Selatan ke China. Hal ini terjadi karena China mempunyai pangsa pasar yang besar di Asia maupun di dunia karena jumlah penduduk yang banyak, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Di samping itu pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya mendukung sistem liberalis dimana pemerintah menyerahkan kegiatan ekonomi tersebut kepada pasar dan pemerintah tidak banyak campur tangan dalam hal tersebut.

Selanjutnya adalah bidang industri yang paling diminati oleh investor Korea Selatan di China adalah sektor manufaktur yang bersifat padat karya seperti tekstil, sepatu, dan elektronik. Pada tahun 2004 ada sekitar 25.000 perusahaan manufaktur berskala menengah dan kecil. Perkembangan ekspor dan impor Korea Selatan ke China dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.3**  
**Perkembangan Ekspor dan Impor Korea Selatan ke China Tahun 2004**  
**(US\$ 100 juta, %)**

Ekspor Korea ke China				Impor Korea dari China		
No.	Commodities	Value	Growth Rate	Commodities	Value	Growth Rate
	Total Export to China	351.1	11.5	Total Import from China	219.09	11.3
1	Computer	41.38	68.2	Computer	17.19	65.7
2	Wireless communication equipment	26.21	14	Garment	14.95	11
3	Synthetic resin	22.48	56.7	Coal	11.27	47.3
4	Semiconductor	22.42	102.5	Semiconductor	10.45	54.1
5	Steel sheet	22.09	30.2	Applied Electronic Appliance	7.69	67.46
6	Petrochemical product	18.38	47.4	Aluminium	6.52	60.4
7	Electronic valve	13.31	73.1	Chemical Materials	5.26	36
8	Petrochemical synthetic fibers	12.56	805.6	Steel sheet	5.14	297.8
9	Automobiles parts	12.27	110.8	Static electric equipment	4.18	32.4
10	Petrochemical intermediate product	9.71	59.2	Acoustic equipment	4.49	36.9

*Sumber: The Export-Import Bank of Korea, 2004*

### 3.2.2. Perkembangan Investasi Korea Selatan di Vietnam

Vietnam pada tahun 1986 membuat komitmen bersejarah dengan melakukan perbaikan ekonomi dan kebijakan politik yang dinamakan 'Doi Moi'. Dengan kebijakan ini target Vietnam adalah industrialisasi dan modernisasi. Vietnam mencoba bangkit dari politik isolasi yang selama ini dijalankan dengan bergabung dengan ASEAN pada bulan Juli 1995, menjadi anggota APEC pada bulan November 1998.

Dalam tahun 2003, GDP Vietnam rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,24% yang diperoleh dari sektor industri dan konstruksi sebesar 3,86%, sektor jasa sebesar 2,6%, dan sektor pertanian, kehutanan sebesar 0,70%. Pertumbuhan GDP Vietnam dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:<sup>76</sup>

**Tabel 3.2.4.**  
**Pertumbuhan GDP Vietnam melalui Sektor-Sektor Tertentu**  
**(1999-2006)**

		%							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Pertumbuhan GDP	4,77	6,79	6,89	7,04	7,34	7,79	8,43	8,17	
Pertanian, Kehutanan	5,23	4,63	2,98	4,06	3,62	4,36	4,04	3,40	
Industri dan Konstruksi	7,68	10,7	10,39	9,44	10,48	10,22	10,65	10,37	
Sektor Jasa	2,25	5,32	6,10	6,54	6,45	7,26	8,48	8,29	

*Sumber: General Statistic Office (GSO), Vietnam, 2006.*

<sup>76</sup> *Vietnam Economic Report*. dalam Diakses tanggal 23 April 2008. pukul 19.30 WIB.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan GDP sampai tahun 1999-2006 mengalami peningkatan. Pertumbuhan di bidang pertanian dan kehutanan sebesar 3,20 % lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sementara di bidang industri dan konstruksi rata-rata 10,48 % pada tahun 2003 lebih tinggi dari 9,44 % pada tahun 2002. Di bidang jasa yang mengalami penurunan sedikit dari 6,54 % di tahun 2002 menjadi 6,45 % di tahun 2003. Untuk tahun berikutnya yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan, walaupun agak turun sedikit di tahun 2005 dari 8,48 % menjadi 8,29 %.

Selanjutnya peran penanaman modal asing (PMA) di Vietnam sangat penting untuk mengangkat perekonomian negara. Sejak tahun 1987 ada 3.770 perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Vietnam, dengan total investasi sebesar US\$ 41 milyar. Umumnya industri ini adalah industri manufaktur yang mengandalkan tenaga kerja upah murah, dan semangat kerja bangsa Vietnam yang terkenal tinggi. Saat ini ada sekitar 60 negara yang menanamkan investasi di Vietnam. 64% adalah perusahaan yang berasal dari Asia, 21% perusahaan Eropa, Amerika Utara dan Karibia 13%. Negara-negara industri Asia, Korea, Jepang, Taiwan, Hongkong, dan Singapura menguasai 59% PMA dengan total investasi US\$ 22 milyar.

Kelembagaan penanaman modal di Vietnam dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Insentif fiskal diatur dalam *Law on Investment* No. 59. Prosedur investasi di Vietnam mulai 1 Juli 2006 telah menggunakan sistem registrasi dengan skala investasi tertentu sebagai batasan pelaksanaan registrasi antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Untuk menarik investasi, Vietnam memberikan banyak insentif. Pemberian insentif merupakan salah satu hal mendasar yang dilihat oleh investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Disamping itu, investor juga mempertimbangkan adanya pasar yang baru, akses memperoleh bahan baku dan tenaga kerja. Sebelum menanamkan modalnya ke suatu negara, biasanya investor, khususnya investor luar negeri, mempertimbangkan dua faktor utama untuk menilai suatu negara guna dijadikan lokasi penanaman modal. Faktor pertama merupakan elemen mendasar yaitu adanya kesempatan ekonomi, stabilitas politik

dan kepastian hukum. Kemudian investor juga melihat apakah penerima investasi menyediakan berbagai insentif seperti insentif dalam bidang perpajakan dan berbagai insentif lain yang dianggap penting dan menguntungkan untuk melakukan penanaman modal.<sup>77</sup>

Beberapa negara menawarkan berbagai insentif pajak dengan berbagai alasan. Bagi negara yang berada pada transisi, pemberian insentif pajak merupakan suatu keharusan, dan hal ini biasanya diatur oleh undang-undang pajaknya. Bagi negara lain, pemberian insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor karena banyaknya hambatan yang membuat investor tidak mau menanamkan modalnya. Hambatan tersebut antara lain stabilitas politik yang kacau, birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum dan administrasi perpajakan yang kurang baik. Alasan lain dari pemberian insentif pajak adalah untuk meningkatkan daya saing dengan negara lainnya yang mempunyai kepentingan yang sama dengan Vietnam.

Pemberian insentif-insentif pajak bagi investor dapat diartikan sebagai pengurangan beban pajak yang tujuannya membantu investor melakukan investasi pada proyek-proyek atau sektor-sektor tertentu. Insentif pajak yang diberikan seperti pengurangan tarif pajak penghasilan, pembebasan pajak, ketentuan-ketentuan akuntansi yang memperbolehkan penyusutan yang dipercepat, kompensasi kerugian sampai jangka waktu tertentu, keringanan pajak impor bahan baku dan bahan pembantu dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

*United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD)* memberikan kategori atas berbagai jenis insentif pajak yang dapat berlaku secara umum yaitu:<sup>79</sup>

1. Pengurangan tarif pajak penghasilan badan usaha (*Reduce Corporate Income Tax Rate*).

---

<sup>77</sup> Pancras J. Nagy. *Country Risk, How To Assess, Quantify and Monitor*. London, Euromony Publications, 1979, hal. 54. Lihat juga Anwar Shah (ed). *Fiscal Incentives For Investment and Innovation*. New York, Oxford University Press, 1995.

<sup>78</sup> United Nation Conference On Trade and Development (UNCTAD). *Tax Incentives And Foreign Direct Investment, A Global Survey*, New York and Geneva, United Nation Publication, 2000, hal. 4.

<sup>79</sup> Ibid.

2. Kompensasi kerugian ke tahun yang akan datang (*Loss Carry Forward*).
3. Pembebasan Pajak (*Tax Holiday*)
4. Keuntungan Investasi (*Investment Allowance*)
5. Kredit Pajak Investasi (*Investment Tax Credits*)
6. Pengurangan pajak atas pembayaran dividen dan bunga yang dibayar ke luar negeri (*Reduced taxes on dividends and interest paid abroad*).
7. Perlakuan khusus terhadap peningkatan modal jangka panjang (*Preferential treatment of long-term capitals gain*)
8. Pengurangan biaya-biaya tertentu (*Deductions for qualifying expenses*)
9. Tarif nol atau pengurangan tariff (*Zero or reduced tariffs*)
10. Pengurangan yang didasarkan pada jumlah pekerja (*Employment-based deductions*)
11. Pajak pertambahan nilai (*Tax credits for value addition*)
12. Pengurangan kredit pajak untuk perolehan mata uang asing (*Tax reductions credits for foreign hard currency endings*)

Hal yang dilakukan oleh Vietnam salah satu diantaranya adalah pembebasan PPh selama periode tertentu yang berkisar antara 1-8 tahun. Pembebasan ini dihitung mulai dari tahun pertama untung yang diberikan kepada proyek investasi yang dipromosikan mendapat tarif preferensi. Selain itu juga diberikan lagi pengurangan PPh sebesar 50% setelah masa Tax Holiday untuk waktu sampai 4 tahun. Tingkat pajak standar adalah 25%. Tingkat pajak preferensi 10% untuk waktu 15 tahun, 15% untuk waktu 12 tahun dan 20% untuk waktu 10 tahun bagi investasi-investasi tertentu yang dipromosikan. Lebih jelasnya, jenis-jenis insentif pajak yang diberikan oleh beberapa negara tetangga dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.5.

Ringkasan Beberapa Jenis Insentif Pajak di Beberapa Negara

Negara	Tax Holiday	Pengurangan Tarif Pajak	Invest allow/ Tax Credit	Pengurangan PPN	Pengurangan Biaya Riset	Pengurangan biaya tertentu
Australia	-	√	√	√	√	√
China	√	√	√	√	√	-
Malaysia	√	√	√	-	√	√
Filipina	√	-	√	√	√	√
Singapura	√	√	√	-	√	√
Thailand	√	-	-	√	√	√
Vietnam	√	√	-	√	-	√

Sumber: *United Nations Conference On Trade and Development, Genova, 2000.*<sup>80</sup>

Vietnam dan Korea Selatan menormalisasikan hubungannya sejak Desember 1992, setelah sebelumnya sempat renggang akibat dampak dari terjadinya Perang Vietnam. Korea Selatan adalah negara demokrasi liberal sementara Vietnam adalah negara sosialis. Setelah keadaan normal kembali, Vietnam dan Korea Selatan mengadakan perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:<sup>81</sup>

<sup>80</sup> *United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD), Genova, 2000*

<sup>81</sup> Tran Dinh Lam, *The Economic Co-Operation Between South Korea and Vietnam*. dalam . Diakses tanggal 25 Maret 2008, pukul 17.25.WIB.

**Tabel 3.2.6.**  
**Perdagangan Bilateral: Ekspor-Impor Korea Selatan ke Vietnam**  
**(juta US\$)**

Tahun	Ekspor	Impor	Balance
1999	1.485,8	319,9	1.165,9
2000	1.753,6	352,6	1.401,0
2001	1.886,8	406,1	1.480,7
2002	2.279,6	468,7	1.810,9
2003	2.625,4	492,1	2.133,3
2004	3.359,4	608,1	2.751,3
2005	3.600,5	630,9	2.969,6

*Sumber: Korea Export-Import Bank, 2005.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perdagangan ekspor Korea Selatan ke Vietnam dari tahun 1999 semakin meningkat sampai pada tahun 2005 sebesar 3.600,5 juta US\$. Begitu juga dengan impor dari Vietnam dari tahun 1999 sampai tahun 2005 meningkat juga sebesar 630,9 juta US\$. Dengan demikian dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 dari perhitungan perdagangan ekspor dan impor Korea ke Vietnam, Korea memperoleh keuntungan yang semakin meningkat.

Untuk investasi yang dilakukan oleh Korea, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 Vietnam menduduki nomor empat dari sepuluh negara tujuan investasi Korea. Peringkat pertama adalah China dengan jumlah proyek sebanyak 12.925 dan jumlah investasi sebesar 14.102.554. Kedua adalah Amerika dengan 5.968 proyek dan nilai investasi sebesar 12.031.189. Ketiga adalah Jepang dengan 847 proyek dan nilai investasi sebesar 1.075.163. Selanjutnya keempat adalah Vietnam dengan 810 proyek dan nilai investasi sebesar 1.580.070.<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Hwy-Chang Moon. "Foreign Direct Investment as a Strategy for Enhancing Cooperation between Korea and Southeast Asia", dalam [www.nabli.go.kr/board/data/policy\\_009/paper11.pdf](http://www.nabli.go.kr/board/data/policy_009/paper11.pdf). Diakses tanggal 3 April 2008, pukul 20.10 WIB.



Sementara itu dari sepuluh besar negara yang melakukan investasi di Vietnam, Korea Selatan menempati urutan ketiga setelah Jepang dan Singapura. Investasi Jepang di Vietnam sebesar 4.110 juta US\$ dengan jumlah proyek sebesar 476. Kedua adalah Singapura dengan nilai investasi sebesar 3.228 juta US\$ dengan jumlah proyek sebesar 329.<sup>83</sup>

Bidang investasi yang paling diminati oleh investor dari Korea adalah industri manufaktur dan konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 1.027 juta US\$ atau sebesar 69,6%. Bidang yang kedua adalah pertanian dan kehutanan sebesar 157,5 juta US\$ atau sebesar 14,1%. Selanjutnya adalah di bidang jasa sebesar 328 juta US\$ atau 16,3%.<sup>84</sup>

### 3.3. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Meningkatkan PMA

Dalam pertemuan ke 13 Komite Bersama Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan (*Indonesia-Korea Economic Cooperation Committee*) di Jakarta Indonesia menawarkan 15 sektor investasi padat modal kepada sekitar 70 pengusaha Korea yang hadir. Lima belas sektor tersebut akan mendapatkan tax allowanve berupa pengurangan pajak sebesar 30 % selama 6 tahun. Ke 15 sektor tersebut adalah : industri rasa (flavor), industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri pulp and paper board, industri kimia, industri kimia lainnya, industri karet dan pupuk karet, industri porselin, industri besi dan baja, industri logam bukan besi, industri mesin dan peralatan, industri motor elektrik termasuk generator dan transformer, industri elektrik dan ICT, sektor transportasi darat, industri kapal dan reparasi kapal, dan industri logam non besi.<sup>85</sup>

Dalam pertemuan tersebut Kepala BKPM M. Ludfi ikut mempromosikan Batam dan Bintan sebagai kawasan ekonomi khusus yang memiliki keistimewaan peraturan perpajakan untuk industri yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya Indonesia-Korea Selatan menandatangani 3 kesepakatan kerjasama dalam investasi di bidang pembinaan dan pengembangan UKM, pembiayaan ekspor jangka menengah, dan peningkatan investasi Korea di

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Antara*, 4 Desember 2006.

Indonesia dan sebaliknya. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua BKPM M. Ludfi dan Presiden Korea Trade-Investment and Promotion Agency (KOTRA) Ki-Hwa Hong.

Dalam bidang pembiayaan dan pengembangan UKM, penandatanganan MoU dilakukan oleh Presdir PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Adil Tobing dengan Presiden Small Corporation Korea Selatan, Beom Do.

Kesepakatan dalam pembiayaan ekspor jangka menengah yang akan dilakukan adalah rencana proyek PT. Krakatau Steel (KS) untuk pabrik baja dan konstruksi. Kesepakatan ini sudah ditandatangani langsung oleh Menteri Sumber Daya Industri Korea, Chung Sye Kyun, Direktur Korea Insurance Cooperation, Kim Song Woong, dan Dirut KS Daenulhay. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) itu bagi Korea akan berpengaruh besar sebab proyek baja konstruksi diperkirakan akan mencapai 500 juta US\$.

#### **A. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Promosi Pembangkit Nuklir**

Indonesia dan Korea Selatan sepakat melakukan kerjasama dalam mempromosikan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, sehingga pada saatnya nanti masyarakat dapat menerima keberadaan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi nasional di masa yang akan datang. Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerjasama promosi di bidang PLTN itu ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dengan Menteri Komersial, Industri dan Energi Korea Selatan Chung Sye Kyun, usai pertemuan Komite Bersama Konsultasi Bidang ESDM RI-Korsel ke-22 di Jakarta, Senin 4 Desember 2006.<sup>86</sup>

Purnomo mengatakan, MoU tersebut bukan untuk pembangunan PLTN melainkan sebagai upaya mensosialisasikan rencana pemerintah Indonesia untuk membangun PLTN dimasa depan sehingga yang diukur adalah faktor pemahaman dari masyarakat (*public acceptance*). Keputusan untuk bekerjasama dengan Korsel dalam mempromosikan PLTN di Indonesia karena negara itu telah berpengalaman mengoperasikan PLTN sejak tahun 1970-an. Sampai saat ini, di

<sup>86</sup> Lihat <http://www.indeni.org>, Diakses tanggal 31 Maret 2008, pukul 14.57.

Korsel telah ada sekitar 20 PLTN dengan total kapasitas 17.700 Mega Watt (MW). Selain itu teknologi PLTN yang dipakai oleh Korsel sesuai dengan teknologi PLTN yang sudah dikembangkan oleh BATAN di Serpong.

Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi Departemen ESDM, J. Purwono mengatakan, sebagaimana hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, lokasi rencana pembangunan PLTN di Indonesia tetap di Pulau Jawa yakni di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi PLTN di Jawa karena pertimbangan ekonomis mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Disamping itu jaringan transmisi kelistrikan yang sudah permanent adalah Jawa-Bali sehingga sangat cocok PLTN dibangun di dekat pusat beban. Ditargetkan pada tahun 2015-2017, Indonesia sudah mengoperasikan PLTN dengan kapasitas 1.000 MW.

#### **B. Kerjasama Dalam Bidang Kehutanan**

Persetujuan kerjasama bidang kehutanan antara dua negara ditandatangani pada tahun 1987, sementara perusahaan Korea Selatan telah ikut memainkan peran sejak awal pembangunan kehutanan Indonesia. Bagi Korea Selatan, Indonesia adalah negara terbesar tempat penanaman modal di bidang kehutanan sedangkan bagi Indonesia, Korea Selatan adalah negara pengimpor terbesar barang-barang kehutanan dan perkebunan produksi Indonesia.

Dalam hubungan kerjasama itni, Korea Selatan dan Indonesia berusaha untuk menjaga kelestarian hutan yang dimiliki Indonesia dengan berbagai proyek bersama penanaman pohon, pemulihan tanah, perlindungan hutan, dan sebagainya. Indonesia dan Korea Selatan ikut serta dalam menandatangani Protokol Kyoto yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan internasional.

Menurut data statistik yang disusun oleh Jawatan Kehutanan Korea ada 7 perusahaan Korea yang menanamkan modalnya di Indonesia di bidang kehutanan

dan mempekerjakan sebanyak 7.600 tenaga kerja Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>87</sup>

**Tabel 3.3.1.**  
**Perusahaan Korea di Bidang Kehutanan dan Volume Penanaman Modalnya**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Lokasi Operasi</b>	<b>Bidang Kerja</b>	<b>Volume Penanaman Modal (US\$. 000)</b>
KODECO	Kalimantan Selatan, Irian Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan hutan: 315.000 ha.</li> <li>▪ Produksi kayu lapis: 179.000 m<sup>3</sup></li> <li>▪ Penanaman pohon kecil: 5.650 ha</li> </ul>	45.670
PT. Inne Dongwha	Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan hutan: 120.000 ha.</li> <li>▪ Produksi kayu lapis: 80.000 m<sup>3</sup></li> </ul>	5.237
PT. Sunkyung	Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produksi kayu lapis: 35.000 m<sup>3</sup></li> </ul>	235
Youlim sari	Irian Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan hutan: 395.000 ha.</li> <li>▪ Produksi kayu lapis: 24.000 m<sup>3</sup></li> </ul>	12.500
PT. No Song	Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengolahan kayu: 9.000 m<sup>3</sup></li> </ul>	1.000
PT. Samhwa	Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengolahan kayu: 13.000 m<sup>3</sup></li> </ul>	1.185
Industri Duri	Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengolahan kayu: 35.000 m<sup>3</sup></li> </ul>	1.775
Total			67.602

Sumber: Jawatan Kehutanan Korea, 2000

<sup>87</sup> Yang Seung-Yoon. *Op.cit.*, hal.138.

Pada tanggal 1 Agustus 2006, kementerian Kehutanan RI dan Forest Service Agency Korea menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai kerjasama dan investasi di sektor kehutanan. Investasi sektor kehutanan diarahkan dalam bentuk penanaman hutan kembali di Indonesia melalui pembangunan hutan tanaman industri, penghijauan, dan reboisasi.

